



L A P O R A N
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



I N S P E K T O R A T D A E R A H

K O T A D E P O K
T A H U N 2 0 1 9

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas Ridho dan Rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Inspektorat Kota Depok Tahun 2019 yang menjadi gambaran hasil dari semua upaya pencapaian tujuan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Depok, Inspektorat mempunyai tugas dan fungsi yang strategis yaitu melaksanakan Pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Segala upaya telah dilakukan oleh Inspektorat dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sehingga terwujud capaian kinerja yang tertuang dalam laporan kinerja ini.

Harapan kami, semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini akan dapat lebih memacu kinerja Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di masa yang akan datang.

Depok, 31 Januari 2020
INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK,

Firmanuddin, S.E., Ak.
Pembina Utama Muda /IV c
NIP. 19640629 198503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Permasalahan Utama	3
1.5 Sistematika Penyajian	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Rencana Strategis	5
2.2 Perjanjian Kinerja	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja Organisasi	
3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun Ini	9
3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu.....	10
3.3 Perbandingan antara Realisasi dengan target Renstra	13
3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional.....	14
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja.....	14
3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	18
3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kinerja	20
B. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	25
4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja	24
4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja	24
4.3 Strategi Pemecahan Masalah	24

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kota Depok	6
Tabel 2.2.1	Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2018	7
Tabel 2.2.2	Program Inspektorat Daerah Kota Depok	8
Tabel 3.1	Capaian Indikator Inspektorat Daerah Kota Depok.....	9
Tabel 3.2.1	Target Kinerja Tahun Lalu	10
Tabel 3.2.2	Target Kinerja Tahun Ini	11
Tabel 3.3	Target Jangka Menengah Berdasarkan Renstra	13
Tabel 3.5.1.1	Indikator Kinerja Pertama	15
Tabel 3.5.1.2	Indikator Kinerja Kedua	15
Tabel 3.5.1.3	Indikator Kinerja Ketiga	16
Tabel 3.5.1.4	Indikator Kinerja Keempat	16
Tabel 3.5.1.5	Indikator Kinerja Kelima	17
Tabel 3.5.1.6	Indikator Kinerja Keenam	17
Tabel 3.5.2.1	Indikator Kinerja Pertama	18
Tabel 3.5.2.2	Indikator Kinerja Kedua	18
Tabel 3.5.3.1	Indikator Kinerja Kedua	18
Tabel 3.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Laporan Keuangan	19
Tabel B1	Realisasi Anggaran	18

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- LAMPIRAN 2 : Matrik Renstra Tahun 2019
- LAMPIRAN 3 : Pengukuran Kinerja Tahun 2019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2019 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun 2019 yang melibatkan seluruh aparatur di dalamnya. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target Kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja dengan hasil Pengukuran Kinerja.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 telah ditetapkan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran, dimana 4 (empat) indikator kinerja sasaran mencapai lebih dari 100% (seratus persen), 4 (empat) indikator kinerja sasaran tercapai 100%.

Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	63%	63%	100%	Target tercapai
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	95%	95%	100%	Target tercapai
		Persentase LHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93%	95,75%	102,96%	Melebihi target
		Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke KEMENPAN-RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	1 OPD	4 OPD	400%	Melebihi target

		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95%	100 %	105,26 %	Melebihi target
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90 %	100 %	111,11 %	Melebihi target
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	100%	Target tercapai
3	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Integrated (Level 3)	Integrated (Level 3)	100 %	Target tercapai

Secara keseluruhan kinerja inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2019 telah memenuhi harapan. Meskipun demikian, pada tahun yang akan datang akan terus ditingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah.

Depok, 31 Januari 2020

INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK,



FIRMANUDDIN, S.E., Ak.

Pembina Utama Muda I / IV c
NIP. 19640629 198503 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu organisasi pemerintahan, akuntabilitas merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi dari kedua peraturan ini dijabarkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu pada peraturan diatas maka penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2019 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunann (RKT) dan dokumen perjanjian kinerja yang semuanya merujuk pada pencapaian tujuan organisasi yang tertuang dalam dokumen Revisi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Depok tahun 2016 – 2021.

Selain berisi realisasi pencapaian sasaran juga disertai penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dengan membandingkan target indikator kinerja sasaran. Dengan demikian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2019 dapat menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

1.3 Tugas dan Fungsi

Inspektorat Daerah Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 85 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Tugas Pokok Inspektorat Daerah Kota Depok adalah membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam bidang pengawasan. Sedangkan Fungsi pengawasan diberikan dalam bentuk :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kota; dan
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Depok terdiri dari:

Inspektur, yang membawahi :

- a. Sekretariat, dengan 3 sub bagian terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum,
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:
 - 1) Jabatan Fungsional Auditor;
 - 2) Jabatan Fungsional P2UPD; dan
 - 3) Jabatan Fungsional Umum.

1.4 Permasalahan Utama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Depok berpegang kepada aspek strategis organisasi dan dalam perkembangannya Inspektorat Daerah Kota Depok juga menghadapi permasalahan utama (*strategic issued*) antara lain :

1. Faktor SDM:
 - a. Masih terbatasnya jumlah Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD;
 - b. Belum meratanya kapasitas dan kapabilitas Pejabat Fungsional;
 - c. Kurangnya Sumber Daya Manusia pendukung di Sekretariat.
2. Faktor Kinerja:
 - a. Belum optimalnya penggunaan hasil pemeriksaan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan;
 - b. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan atas hasil pemeriksaan.
3. Faktor Penganggaran: proporsi penganggaran Inspektorat Daerah belum memenuhi standar minimal 1% dari APBD Kota Depok.
4. Faktor Sarana Prasarana:
 - a. Terbatasnya sarana mobilitas bagi operasional bagi Pejabat Fungsional;
 - b. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor.

1.5 Sistematika Penyajian

Substansi yang tercakup dalam Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2019.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

Dalam lampiran menampilkan Perjanjian dan Pengukuran Kinerja Tahun 2019.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada capaian hasil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Depok ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 -2021. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota terkait dengan penetapan atau kebijakan bahwa Rencana Strategis Inspektorat Kota Depok dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel dan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Inspektorat Daerah Kota Depok disusun berdasarkan hasil penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 - 2021 sekaligus telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Depok. Berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Daerah Kota Depok

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah
		Persentase LHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah
		Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke KEMENPAN-RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu
3.	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP

Sumber data : Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2019

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang

disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang telah diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Depok Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	63%
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	95%
		Persentase LHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93%
		Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke Kemenpan RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	1 PD
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95%

2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90 %
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 (satu) Laporan
3	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Integrated (Level 3)

Sumber data : Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2019

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas akan dilaksanakan melalui beberapa Program berikut :

Tabel 2.2.2
Program Inspektorat Kota Depok Tahun 2019

No.	Program	Anggaran (dalam Rupiah)
1.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	914.720.800,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	301.842.000,-
3.	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.372.000,-
4.	Peningkatan Pengawasan	703.756.200,-
5.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemeriksa	482.050.000,-
6.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	39.700.000,-

Sumber data : Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2019

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2019 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok selama tahun 2019. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Depok

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	63%	63%	100%	Target tercapai
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	95%	95%	100%	Target tercapai
		Persentase LHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93%	95,75%	102,96%	Melebihi target
		Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke KEMENPAN-RB	1 OPD	4 OPD	400%	Melebihi target

		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95%	100 %	105,26 %	Melebihi target
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90 %	100 %	111,11 %	Melebihi target
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	100%	Target tercapai
3	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Integrated (Level 3)	Integrated (Level 3)	100 %	Target tercapai

Sumber data : Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2019

Analisis perbandingannya :

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang mencapai lebih dari 100% dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran mencapai 100%.

3.2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja tahun ini dengan tahun lalu.

Tabel 3.2.1 Target kinerja tahun lalu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan SPIP level berkembang	40 %	52 %	130%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal (Inspektorat Kota) yang telah ditindak lanjuti	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal	96%	92,71 %	96,57%

		(Inspektorat Provinsi) yang telah ditindak lanjuti			
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal (BPK) yang telah ditindak lanjuti	92,47%	92,38%	99,90%
		Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke Kemenpan RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	1 PD	2 PD	200%
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditindak lanjuti sesuai SOP	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase perangkat Daerah yang nilai Sakipnya minimal B	30%	61%	202%
		Persentase perangkat Daerah yang Laporan keuangannya sesuai SAP	100 %	100 %	100%
3	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Infrastruktur Level 2	Infrastruktur Level 3DC	100%

Sedangkan target kinerja tahun ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.2 Target kinerja tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	63%	63%	100%
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	95%	95%	100%

		Persentase LHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93%	95,75%	102,96%
		Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke Kemenpan RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	1 OPD	4 OPD	400%
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95%	100 %	105,26 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90 %	100 %	111,11 %
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	100%
3	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Integrated (Level 3)	Integrated (Level 3)	100 %

Analisis perbandingannya :

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja tahun ini dan tahun lalu diketahui bahwa indikator kinerja pada tahun lalu (2018) pada umumnya mengalami perubahan. Dalam hal ini, terdapat perubahan pada hampir semua indikator kinerja diantaranya adalah:

1. Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP;
2. Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah;
3. Persentase LHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah;
4. Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke Kemenpan RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM;
5. Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani;
6. Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi;
7. Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu.

Adanya perubahan indikator kinerja berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja pada Tahun 2019. Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun 2019, realisasi kinerja tahun 2019 relatif mengalami peningkatan capaian yaitu:

1. Persentase LHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah;
2. Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke Kemenpan RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM;
3. Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani.

3.3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Tabel 3.3.1 Target jangka menengah berdasarkan dokumen Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS		SATUAN	REALISASI	TARGET RENSTRA
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		s/d 2019	s/d 2019
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan SPIP level berkembang	%	63	63
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal (Inspektorat Kota) yang ditindak lanjuti	%	95	96
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal (BPK dan Inspektorat Provinsi) yang ditindak lanjuti	%	95,75	92,47
		Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke Kemenpan RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	Perangkat Daerah (PD)	4	1
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	%	100	100

2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip perangkat Daerah yang dievaluasi	%	100	90
		Laporan keuangan yang direviu	Laporan Hasil Reviu (LHR)	1	1
3	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Level APIP	Integrated (Level 3)	Integrated (Level 3)

Analisis perbandingannya :

- a) Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis diketahui bahwa dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran, 3 (tiga) indikator kinerja sasaran melebihi target, 4 (empat) indikator kinerja sasaran sesuai dengan target dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran tidak sesuai target yaitu 'Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal (Inspektorat Kota) yang ditindak lanjuti'. Hal ini terjadi karena kurang optimalnya Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan

3.4. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Berdasarkan Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, diketahui bahwa sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat Kota Depok tidak ada yang terkait dengan standar nasional sehingga tidak dapat dilaporkan.

3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan pengukuran melalui media dokumen Perjanjian Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran

Strategis Inspektorat Daerah Kota Depok dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pada Tahun 2019 Inspektorat Daerah Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi Inspektorat Daerah Kota Depok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berbunyi: **“Kota Depok yang unggul, nyaman dan Religius”**. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

3.5.1 Sasaran Strategis Pertama: Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan.

Sasaran Strategis Pertama memiliki 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang terdiri atas:

Tabel 3.5.1.1 Indikator Kinerja Pertama

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1.	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	63%	63%	100 %	Target tercapai

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja:

Tercapainya indikator kinerja sasaran dengan nilai capaian sebesar 100 % disebabkan oleh adanya penilaian Maturitas SPIP Level 3 dari BPKP yang mewajibkan seluruh Perangkat Daerah menerapkan SPIP. Menindak lanjuti hal tersebut, Inspektorat Daerah Kota Depok memberikan dukungan penuh kepada Perangkat Daerah untuk menerapkan SPIP pada instansinya masing-masing.

Tabel 3.5.1.2 Indikator Kinerja Kedua

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
2.	Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	95 %	95 %	100 %	Target tercapai

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja:

Tercapainya indikator kinerja sasaran dengan nilai capaian sebesar 100 % disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP serta meningkatnya koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan.

Tabel 3.5.1.3 Indikator Kinerja Ketiga

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
3.	Persentase LHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93%	95,75%	102,96%	Melebihi target

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja:

Tercapainya indikator kinerja sasaran dengan persentase capaian sebesar 103,55% karena adanya komitmen kepala daerah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka monitoring LHP BPK dan Inspektorat Provinsi Kota Depok.

Tabel 3.5.1.4 Indikator Kinerja Keempat

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
4.	Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke KEMENPAN-RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	1 PD	4 PD	400 %	Melebihi Target

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja:

Indikator kinerja sasaran tercapai 400% karena adanya penambahan 3 (tiga) Perangkat Daerah yang diusulkan ke KemenPAN & RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM.

Tabel 3.5.1.5 Indikator Kinerja Kelima

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
5.	Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95 %	100 %	105,26 %	Melebihi target

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja:

Indikator kinerja sasaran tercapai 105,26% karena semua pengaduan telah ditangani oleh pada APIP.

3.5.2 Sasaran Strategis kedua “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah”

Sasaran Strategis Kedua memiliki 2 (dua) indikator kinerja sasaran:

Tabel 3.5.2.1 Indikator Kinerja Pertama

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1.	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90%	100%	111,11 %	Melebihi target

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja:

Indikator kinerja sasaran tercapai 111,11% karena Inspektorat Daerah Kota Depok berhasil menyelesaikan evaluasi Sakip dan pendampingan dalam memperbaiki dokumen SAKIP nya.

Tabel 3.5.2.2 Indikator Kinerja Kedua

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
2.	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	100 %	Target tercapai

Analisis penyebab keberhasilan capaian kinerja:

Indikator kinerja sasaran tercapai 100% karena Inspektorat Daerah Kota Depok telah berhasil menyelesaikan Reviu Laporan Keuangan.

3.5.3 Sasaran Strategis Ketiga ” Meningkatnya level Kapabilitas APIP ” dengan indikator kinerja sasaran adalah ” nilai kapabilitas APIP dari BPKP ”

Tabel 3.5.3.1 Indikator Kinerja Nilai Kapabilitas APIP dari BPKP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Level 3	Level 3	100 %	Target tercapai

Analisis penyebab/keberhasilan capaian kinerja:

Tercapainya indikator kinerja sasaran berupa penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP dengan Nilai Level 3 (Integrated).

3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2019 dapat kami simpulkan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Laporan Keuangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	63%	63%	100%	84.327.000,-	62.164.000,-
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	95%	95%	100%	12.549.900,-	10.074.500,-
		Persentase LHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93%	95,75%	102,96%		

		Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke Kemenpan RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	1 OPD	4 OPD	400%	54.056.800,-	46.605.000,-
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95%	100 %	105,26%	13.851.700,-	6.791.000,-
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90 %	100 %	111,11%	10.127.000,-	6.004.850,-
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	100%	20.245.000,-	5.688.650,-
3	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Integrate d (Level 3)	Integrate d (Level 3)	100%	482.050.000,-	462.146.135,-

Berdasarkan tabel diatas Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Untuk Sasaran “Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan “dengan alokasi anggaran sebesar Rp.164.785.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.125.634.500,- atau sebesar 76,24% sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.39.150.190,- atau sebesar 23,76 % dengan nilai capaian kinerja sebesar 161,64%
- Untuk Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah“ dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.372.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.693.500,- atau sebesar 38,501 % sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.18.678.500,- atau sebesar 61,50 %. dengan nilai capaian kinerja mencapai 105,55%
- Untuk Sasaran “Meningkatnya level kapabilitas APIP “dengan alokasi anggaran sebesar Rp.482.050.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.462.146.135,- atau sebesar 95,87% sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.19.903.865,- atau sebesar 27,45 %. dengan nilai capaian kinerja mencapai 100%.

3.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Untuk Sasaran Strategis Pertama “**Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan**” yang mencapai kinerja sebesar 161,64 % didukung oleh:

- 1) Program Peningkatan Administrasi Perkantoran yang terdiri atas:
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri atas:
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 3) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
 - Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- 4) Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
 - Pengawasan Internal secara berkala/berkala ;
 - Tindak lanjut hasil pengawasan;
 - Pemeriksaan khusus dan PDTT;
 - Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - Pendampingan SPIP;
 - Evaluasi Reformasi Birokrasi.

b. Untuk Sasaran Strategis Kedua “**Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah** ” yang mencapai kinerja sebesar 105,55 % didukung oleh:

- 1) Program Peningkatan Administrasi Perkantoran yang terdiri atas:
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri atas:
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 3) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri atas:
- Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja;
 - Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Daerah;
 - Pelaksanaan Reviu Perencanaan Pembangunan dan Anggaran;
 - Pelaksanaan Reviu Lakip Kota dan Evaluasi Sakip PD.
- 4) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
- Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- c. Untuk Sasaran Strategis Ketiga “**Meningkatnya level kapabilitas APIP** “ yang mencapai kinerja sebesar 100 % didukung oleh :
- 1) Program Peningkatan Administrasi Perkantoran yang terdiri atas:
- Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri atas:
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor;
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemeriksa yang terdiri atas:
- Kapabilitas APIP.

- 4) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
 - Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2018, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kota Depok sebesar Rp.11.804.732.470,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.9.332.291.470,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.2.472.441.000,- dengan Realisasi Total Belanja sebesar Rp.11.227.110.982,- (95,11%), yang terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.8.935.869.245,- (95,75%) dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.2.291.241.737,- (92,67%). Adapun akuntabilitas keuangan berdasarkan alokasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tabel B.1 Realisasi Anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian Anggaran
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	63%	63%	100%	84.327.000,-	62.164.000,-	73,72
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	95%	95%	100%	12.549.900,-	10.074.500,-	80,28
		Persentase LHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93%	95,75%	102,96%			

		Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke Kemenpan RB untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	1 OPD	4 OPD	400%	54.056.800,-	46.605.000,-	86,21
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95%	100 %	105,26%	13.851.700,-	6.791.000,-	49,03
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90 %	100 %	111,11%	10.127.000,-	6.004.850,-	59,03
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	100%	20.245.000,-	5.688.650,-	28,10
3	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Integrated (Level 3)	Integrated (Level 3)	100%	482.050.000,-	462.146.135,-	95,87

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Dalam rangka mencapai Indikator kinerja sasaran tahun 2019, Inspektorat Daerah Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misinya. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian indikator kinerja secara keseluruhan, yakni dari 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, diketahui bahwa 4 (empat) indikator kinerja sasaran mencapai target kinerja diatas 100% dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran mencapai kinerja 100%.

4.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

Pada tahun 2019 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Depok, yaitu masih terbatasnya kuantitas dan kualitas Fungsional Auditor atau Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Selain itu rekomendasi hasil pemeriksaan banyak yang berisi penyusunan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan Wali Kota yang memerlukan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait sehingga membutuhkan waktu yang lama dan rekomendasi hasil pemeriksaan banyak yang berisi penyusunan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan Wali Kota memerlukan koordinasi dengan perangkat Daerah.

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

Dalam menghadapi kendala dan hambatan yang ada, Inspektorat Daerah Kota Depok melakukan langkah-langkah taktis dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan jumlah auditor/pengawas pemerintah melalui inpassing;
2. Meningkatkan kapasitas auditor / pengawas pemerintahan melalui diklat substantif maupun penjenjangan;
3. Mengusulkan adanya reward and punishment terhadap Perangkat Daerah dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

LAMPIRAN

RUMUS PENGUKURAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Rekap
1.	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	63%	63%	100%	$63/63 \times 100\% = 100\%$
		Persentase LHP Inspektorat Daerah yang ditindak lanjuti oleh Perangkat Daerah	95%	95%	100%	$95/95 \times 100\% = 100\%$
		Persentase LHP BPK dan Inspektorat Provinsi yang dipantau oleh Inspektorat Daerah	93%	95,75%	102,96%	$95,75/93 \times 100\% = 102,96\%$
		Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan ke KEMENPAN-RB	1 OPD	4 OPD	400%	$4/1 \times 100\% = 100\%$
		Persentase pengaduan masyarakat dan pelanggaran ASN yang ditangani	95%	100 %	105,26 %	$100/95 \times 100\% = 105,26\%$
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Sakip Perangkat Daerah yang dievaluasi	90 %	100 %	111,11 %	$100/90 \times 100\% = 111,11\%$
		Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang direviu	1 (satu) Laporan	1 (satu) Laporan	100%	$1/1 \times 100\% = 100\%$
3	Meningkatnya level Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP dari BPKP	Integrated (Level 3)	Integrated (Level 3)	100 %	Sertifikat Kapabilitas APIP Level 3 Pemerintah Kota Depok yang diberikan oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah